

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi dan untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi yang ada, maka pajak adalah salah satu potensi penerimaan dalam negeri yang menjadi prioritas utama karena mampu mendominasi penerimaan negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat secara langsung yang bersama-sama mengumpulkan dana untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak, juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak.

Undang-undang pajak di Indonesia saat ini menganut sistem *self assesment*. Artinya bahwa besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak (WP) itu sendiri, dimana wajib pajak harus melaporkan secara teratur seluruh jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh sebab itu, untuk mendukung keberhasilan diterapkannya sistem *self assesment* salah satu hal mendasar yang harus dilakukan adalah melaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*) perpajakan. Penegakan hukum dalam perpajakan mempunyai korelasi yang positif dengan kesuksesan penerimaan pajak. Artinya, pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih

baik dari wajib pajak dan akan bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak.

Tindakan pemeriksaan ini dilakukan sebagai sarana penegakan hukum (*law enforcement*) bagi wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh wajib pajak, dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi maka upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tentunya akan tercapai.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pengertian pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis-jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Kota Padang antara lain: (1) Pemeriksaan Rutin, (2) Pemeriksaan Kriteria Seleksi, (3) Pemeriksaan Khusus, (4) Pemeriksaan WP Lokasi, dan (5) Pemeriksaan Bukti Berjalan.

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang, yaitu di KPP Pratama Padang, khususnya pada seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal yang mengurus pemeriksaan terhadap wajib pajak yang lalai dalam pemenuhan kewajiban

perpajakannya. Alasan pemilihan tempat penelitian di KPP Pratama Padang, yaitu: (1) Dalam skala mikro, kondisi kota Padang sangat strategis dan memiliki mobilitas kegiatan ekonomi yang cukup tinggi sehingga memberi peluang untuk penggalan yang potensial, (2) Berbagai data dan informasi yang diperlukan dapat diperoleh di lokasi penelitian sehingga pemilihan lokasi penelitian akan memberikan kontribusi positif atas validitas hasil penelitian sebagai karya ilmiah, (3) Belum ada satupun penelitian ini dilakukan di kota Padang.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul **“Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan PPh Orang Pribadi Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang)”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun pokok-pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kontribusi pelaksanaan pemeriksaan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak khususnya PPh Orang Pribadi (PPh Orpri) di KPP Pratama Padang?
2. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pemeriksaan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak khususnya PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi pelaksanaan pemeriksaan dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak khususnya PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Padang.
2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak khususnya PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Padang.

1.4 Batasan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini mencakup penerimaan pajak khususnya PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama Padang sebagai hasil dari pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan.
2. Periode penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah tahun 2011 sampai tahun 2013.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Mahasiswa
Sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan semua ilmu yang telah diperoleh selama duduk di bangku kuliah dan menambah pengetahuan

mengenai efektivitas pelaksanaan pemeriksaan, khususnya pada PPh Orang Pribadi, untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

2. Bagi Pihak Pemerintah

Sebagai salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan pemeriksaan yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dan untuk lebih meningkatkan lagi pengawasan dan pembinaan dalam memeriksa wajib pajak yang lalai dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat pada bidang dan topik permasalahan yang sama.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan, penelitian ini terbagi dalam lima bab dengan rincian:

Bab satu adalah pendahuluan. Bab ini dimulai dengan penjabaran latar belakang yang mendasari munculnya ide penelitian. Dilanjutkan dengan penyusunan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan.

Bab dua adalah tinjauan pustaka. Bab ini meninjau teori dan konsep yang relevan terkait dengan masalah penelitian. Selain itu, dikemukakan tinjauan

penelitian terdahulu, review penelitian terdahulu, serta kerangka teoritis yang berperan sebagai landasan dalam menganalisis masalah penelitian.

Bab tiga adalah metode penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian, jenis dan sumber data penelitian. Dilanjutkan dengan teknik pengumpulan data serta metode analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini.

Bab empat adalah hasil dan pembahasan. Bab ini memaparkan mengenai objek penelitian, serta analisis dan pembahasan hasil penelitian sehingga dapat menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

Bab lima adalah penutup. Bagian ini merupakan bab terakhir yang mengemukakan kesimpulan atas hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Beberapa saran, dan keterbatasan penelitian juga dijabarkan pada bab ini.